

KEBIJAKAN DILEMATIS AS DI TELUK PERSIA

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Ketegangan di kawasan Teluk Persia memuncak kembali. Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dimotori Amerika Serikat (AS) memberikan keputusan sanksi lebih keras terhadap Iran. Sebaliknya, Iran berposisi bahwa kebijakan yang akan diambil DK PBB tersebut merupakan suatu kesalahan sejarah dalam peradaban umat manusia.

Hal itu dikarenakan lembaga dunia tersebut telah sangat jelas didikte oleh kepentingan AS. Fakta membuktikan bahwa sejak tahun 2003 AS jelas-jelas sudah melanggar hukum internasional dengan cara menginvasi Irak secara sepihak, tanpa mendapatkan otoritas dari DK PBB. Alasan invasi AS ke Irak adalah sama persis dengan apa yang kerap didengungkan oleh para elit pemerintahan Bush terhadap Iran selama ini.

Para elit pemerintahan Iran melihat bahwa segala upaya AS melalui DK PBB untuk memberikan sanksi lebih keras ke Iran hanyalah suatu rekayasa untuk menghambat Iran menjadi negara maju dalam bidang teknologi, khususnya teknologi nuklir. Bahkan Amerika dianggap bertujuan untuk menguasai sumber daya minyak (*petropolitics*) di Iran.

Sebenarnya, perselisihan AS-Iran sudah lama terjadi. Kedua negara ini sudah bersitegang sejak tahun 1979 ketika Kedutaan Besar AS beserta para diplomatnya di Teheran disandera oleh mahasiswa Iran. Sejak saat itu AS menginginkan adanya pergantian rejim di Iran. AS menuduh Iran sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, mendukung terorisme, dan merupakan pemerintahan yang tidak demokratis. Secara umum, Iran dianggap AS telah melanggar perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) dengan kepemilikan teknologi *Weapons Mass Destruction* (WMD) dengan kriteria *Nuclear, Biological and Chemical weapon* (NBC). Washington mengkategorikan Iran sebagai salah satu dari *the rogue states* (Iran, Irak, dan Korea Utara). Suatu negara akan dan dapat dikategorikan sebagai *the rogue states* apabila negara tersebut membenci AS dan memiliki senjata pemusnah massal, merupakan rejim yang agresif serta melanggar hukum internasional.

Bahkan Iran bersama Korea Utara dan Irak diberi label sebagai *an axis of evil* (negara-negara poros setan). Kedua konsep ini (*rogue states* dan *axis of evil*) merupakan bagian dari agenda strategi politik Washington dalam membangun opini publik (*public opinion*) internasional untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Iran.

Di awal abad ke 21 kondisi hubungan bilateral yang “panas” ini makin membara. Hal itu dipicu oleh implementasi kebijakan luar negeri pemerintahan George W. Bush yang bersifat pre-emptif dan unilateral dalam menyelesaikan masalah terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah massal. Sejak September 2001 dalam rangka perang global melawan terorisme, AS telah berhasil menguasai negara-negara yang berbatasan dengan Iran seperti Afghanistan, Irak, Pakistan. Kemudian AS mempunyai sekutu dekatnya yakni Arab Saudi dan Kuwait. Kondisi geo-strategi ini tentu saja sangat membahayakan keamanan nasional Iran.

Kini seiring dengan berjalannya waktu, salah satu embargo yang akan diberikan DK PBB adalah embargo nuklir total. Pertanyaannya kini adalah, dari kalkulasi strategi militer bagaimana implikasi pemberian sanksi embargo nuklir total tersebut pada Iran?.

Embargo nuklir DK PBB kali ini bukanlah hal baru bagi Iran. Sekitar tahun 1980-an Iran pertama kali pernah mendapatkan embargo nuklir dari Barat yang dimotori AS. Saat itu AS khawatir bahwa Iran akan menyalahgunakan teknologi nuklirnya untuk program senjata nuklir. Bahkan, Jerman yang sedang membangun fasilitas reaktor *light water* kembar berkekuatan 1300 MW secara sepihak menghentikan aktifitasnya untuk mendukung seruan embargo AS. Fakta menunjukkan ternyata embargo nuklir AS tersebut justru telah memaksa Iran untuk menjalin kerjasama di bidang nuklir dengan Cina dan Rusia.

Sejak tahun 1990-an Cina dan Rusia telah banyak membantu Iran dalam pembangunan teknologi yang sensitif termasuk *light water*, *heavy water*, produksi *nuclear-grade graphite*, rancangan reaktor riset, teknologi pengayaan laser, mentransfer teknologi nuklir dan teknologi informasi, memberikan pelatihan kepada ilmuwan Iran serta membantu Iran dalam penyediaan bahan reaktor nuklir. Walaupun secara formal sudah ada pernyataan penarikan dukungan bantuan teknik dari Cina dan Rusia, namun para pengamat memperkirakan bahwa diplomasi rahasia (*secret diplomacy*) dukungan pebisnis-militer Rusia dan Cina dalam pengembangan reaktor nuklir Iran masih tetap berlangsung.

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa hampir tiga puluh tahun sejak tampilnya Ayatullah Khomeini ke tampuk kekuasaan, Iran sudah terlatih dan konsisten menggunakan aktor non-negara sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Itu berarti jaringan kerja global (*global networks*) Iran sudah membumi, mengakar, dan teruji. Tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu bagian dari *networking* tersebut adalah berbagai kelompok-kelompok perjuangan di dunia yang anti imperialisme Amerika Serikat.

Maka itu, para pengamat meragukan bahwa suatu serangan militer komando AS atas Iran dapat dilakukan dengan kerahasiaan, kecepatan, dan ketepatan yang adikuat serta kemenangan perang maksimal. Hal itu dikarenakan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat militansi

penduduk, dan kekuatan militer Iran berbeda jauh dengan Irak yang hanya dalam jangka waktu dua minggu dapat ditaklukkan AS.

Kakulasi Untung Rugi

Memang dalam waktu singkat tidak ada kepastian apakah AS akan berhasil menggulingkan pemerintahan Iran saat ini ataupun menghancurkan fasilitas- fasilitas nuklir Iran. Diperkirakan AS akan mengalami kerugian materiil yang sangat besar. Bahkan citra buruk dari opini masyarakat internasional akan makin dalam menghujam sanubari pasukan AS sebagai alat negara bersenjata yang cinta peperangan, bukan cinta damai.

Namun, pilihan dilematis kini mengemuka. Apabila AS tidak menghentikan upaya Iran mengembangkan kapabilitas militernya maka hal itu akan menimbulkan ancaman bagi kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, khususnya kepentingan sekutu terdekatnya Israel. Diproyeksikan akan terjadi kondisi perimbangan kekuatan (*balance of power*) antara Iran dan Israel. Kepemilikan senjata nuklir Iran dapat mengurangi dominasi Israel di kawasan Timur Tengah. Kemudian negara-negara lain di kawasan akan berlomba-lomba untuk memiliki senjata nuklir. Misalnya saja Arab Saudi dan Mesir yang tidak ingin pengaruhnya berkurang di negara-negara Arab dengan bantuan keahlian dari Pakistan akan berupaya mengembangkan senjata nuklir untuk mengimbangi Iran. Kemudian Syria yang mungkin sudah mempunyai satu reaktor nuklir akan punya alasan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Lebih lanjut, dari sudut pandang taktis militer, Iran dapat melakukan serangan militer ke tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas penting AS di Timur Tengah. Rudal Scud B yang memiliki jangkauan 500 km dapat menyerang penghasil minyak terbesar Arab Saudi. Rudal Shihab 3 dapat menyerang Israel dan pasukan-pasukan AS yang bermukim di Timur Tengah. Iran juga mempunyai kemampuan untuk menyerang kapal-kapal minyak dan pelabuhan-pelabuhan di kawasan Teluk Persia. Itu berarti kondisi *chaos* akan terjadi dan berlangsung cukup lama di Timur Tengah. Secara demikian, pasokan minyak dunia akan terganggu yang akan berimbas pada politik, keamanan, dan perekonomian global.

Hal itu dikarenakan Timur Tengah mempunyai arti strategis yang sangat besar. Pertama, berkat letaknya pada titik pertemuan tiga benua (Afrika, Asia, dan Eropa), Timur Tengah menguasai lalu lintas darat, laut, dan udara antara Eropa, Asia, dan Eropa. Kedua, di kawasan itu terdapat beberapa jalur pelayaran penting yaitu Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab El Mandeb, dan Selat Hormuz. Ketiga, kawasan ini mengandung sumber utama minyak, bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri

kontemporer. Cadangan minyaknya hampir sekitar dua pertiga cadangan minyak dunia dan produksinya pernah mencapai 40 persen produksi dunia.

Fenomena ini dipantau jeli oleh pemerintahan Bush. AS menyadari bahwa kondisi perlawanan Iran terhadap AS dapat berefek bola salju menjalar ke berbagai belahan dunia. Bahkan dalam konteks makro strategi, bisa saja terjadi pihak negara luar yakni Rusia, karena kedekatan letak geografinya bisa memanfaatkannya untuk turun tangan. Kita mafhum bahwa Rusia sudah mencuri *start* lebih dulu dalam merangkul dan menarik simpati para pemimpin negara-negara Muslim di dunia melalui forum dialog antara Rusia dengan negara-negara berpenduduk Muslim yang dilaksanakan di Moskow tahun lalu.

Lebih jauh lagi, Cina dapat menjadi kuda hitam dalam proses manajemen konflik di Teluk Persia. Hal itu dikarenakan pergeseran perimbangan kekuatan dalam era paska Perang Dingin terjadi bersamaan dengan tampilnya Cina sebagai kekuatan politik dan militer di dunia. Dalam kancah politik internasional Cina sudah eksis sebagai salah satu negara besar (*major power*) yang sangat berpengaruh dalam menyuarakan kepentingan Dunia Ketiga di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Faktor Cina perlu diperhitungkan, apabila terdapat desakan kuat dari negara-negara Dunia Ketiga yang menentang terjadinya perang besar di Teluk Persia yang diprakarsai AS.

Dengan kata lain, dari keseluruhan paparan di atas dapat dimaknakan bahwa berperang secara militer besar-besaran menjadi sesuatu yang mustahil diwujudkan oleh pemerintahan Bush dalam waktu dekat ini. Pengerahan unjuk kekuatan besar-besaran militer AS di Teluk Persia kali ini hanyalah merupakan suatu bentuk *gun-boat policy* semata seperti di era krisis Teluk Kuba di era 1960an.

Di akhir periode pemerintahannya Presiden Bush mungkin telah menyadari bahwa nasib politiknya boleh jadi terjalin dengan kelangsungan keterlibatan AS dalam kancah konflik di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia baik konflik dengan milisi Irak maupun dengan Iran. Mengkaji makin maraknya tekanan domestik anti-perang melalui pawai besar-besaran yang serentak dilakukan di berbagai kota di AS baru-baru ini, Bush tampaknya akan menghadapi berbagai tragika-tragika peran menuju akhir yang tragis dari masa kepemimpinannya.***

Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.